



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 103 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 22);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
- b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- e. Penutup; dan

- f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
 - a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
 - c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

- (1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
- (3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
- (4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

- a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
- b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
- c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 25 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 103

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

Pemerintah
Kabupaten Bandung



BUPATI BANDUNG PERATURAN



PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JLN.RAYA SOREANG KM. 17 TELP. (022) 5891191-5891192-5891143-5891144 SOREANG

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

NOMOR : 188.4/Kep.95-sekret/2025

LAMPIRAN : 2 (DUA)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 15 ayat (1) menyatakan Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah ;
- b. bahwa dalam penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah yang merupakan implementasi dari rencana strategis Badan Pendapatan Daerah dibutuhkan suatu Tim yang mengkoordinasikan, menyusun, dan mengkaji Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 17);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 56);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 98);
10. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan,

- | | |
|--------|--|
| KESATU | : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025, |
| KEDUA | : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; |
| KETIGA | : Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. |

- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 16 Juni 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH



Drs. H. AKHMAD DJOHARA, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP.196509241987021002

TEMBUSAN, disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai Laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung (Sebagai Laporan);
3. Yth. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Bandung.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 188.4/Kep.95-sekret/2025
TANGGAL : 16 Juni 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA KERJA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

- I. Pengarah : Kepala Badan Pendapatan Daerah
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
- III. Ketua : Perencana pada Sekretariat
- IV. Sekretaris : Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada
: Sekretariat
- V. Anggota
 - 1. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Operasional
 - 2. Kepala Bidang Pajak I
 - 3. Kepala Bidang Pajak II
 - 4. Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan
 - 5. Kasubag Umum dan Kepegawaian
- VI. Kesekretariatan : JFU pada Sekretariat

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH



Drs. H. AKHMAD DJOHARA, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP.196509241987021002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 188.4/Kep.95-sekret/2025
TANGGAL : 16 Juni 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA KERJA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025

TUGAS POKOK TIM
PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

I. PENGARAH

Memberikan arahan kepada tim dalam melaksanakan penyusunan RENJA.

II. PENANGGUNG JAWAB

Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Penyusunan RENJA.

III. KETUA

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan RENJA.
2. Mengendalikan seluruh kegiatan penyusunan RENJA.
3. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BAPENDA.

IV. SEKRETARIS

1. Membantu ketua mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan RENJA.
2. Membantu ketua mengendalikan seluruh kegiatan penyusunan RENJA.
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan RENJA kepada ketua.

V. ANGGOTA

1. Mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dalam penyusunan RENJA.
2. Memberikan arahan teknis dalam penanganan dan pengendalian dalam penyusunan RENJA.
3. Mengkaji data-data yang terkumpul sebagai bahan penyusunan PRENJA.

VI. KESEKRETARIATAN

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi ketatausahaan pelaksanaan tugas.
2. Memberikan pelayanan teknis administrasi.
3. Menyelenggarakan rapat-rapat pelaksanaan kebijakan berdasarkan petunjuk Sekretaris.
4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH



Drs. H. AKHMAD DJOHARA, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP.196509241987021002

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bandung

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Kesesuaian			
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	✓			
2	Pengolahan data dan informasi.	✓			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	✓			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	✓			
9	Perumusan kegiatan prioritas.				
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.		✓	Tidak ada Musrenbang	
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	✓			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	✓			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	✓			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	✓			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	✓			

Soreang, 16 Juni 2025
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

Drs. H. AKHMAD DJOHARA, M. Si.
NIP. 196509241987021002

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung telah menyusun perubahan Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2025 ini adalah bahan acuan/dokumen rencana tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Hal ini merupakan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Bandung Tahun 2025 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung, pun bertujuan agar pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan lebih terarah, tepat sasaran dan tepat waktu.

Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semua dalam rangka pelaksanaan tugas dan amanah.

Soreang, 16 Juni 2025

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



Drs. H. AKHMAD DJOHARA, M.Si.

Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 196509241987021002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISIii

BAB I PENDAHULUAN.....3

 1.1 Latar Belakang3

 1.2 Landasan Hukum.....6

 1.3 Maksud dan Tujuan12

 1.4 Sistematika Penulisan.....13

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU... 15

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
 Perangkat Daerah.....15

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah26

 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....34

 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan44

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....58

 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat58

 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah59

 3.3 Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan66

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 82

BAB V PENUTUP 92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta perubahan rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Akhir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua

sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Dalam mekanismenya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 20 dinyatakan bahwa BAPPERIDA menyiapkan RKPD Perubahan sebagai penjabaran dari RPJM Daerah. Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 17 dijelaskan bahwa BAPPERIDA menyusun RKPD Perubahan, yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kab. Bandung Tahun 2005 - 2025, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Dalam prosesnya, penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 merujuk pada rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2021-2026 Kabupaten Bandung.

BAPPERIDA bertugas mengkoordinasikan penyusunan RKPD Perubahan dan selanjutnya disepakati menjadi dokumen rancangan akhir RKPD di dalam Musrenbang RKPD. Lebih lanjut RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tahunan daerah serta sebagai acuan dalam proses penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025.

Penyusunan RKPD Perubahan tersebut ditetapkan melalui **Surat Edaran Bupati Bandung Nomor DL.03.01/ 4382 / BAPPERIDA tentang Agenda Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2025.**

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

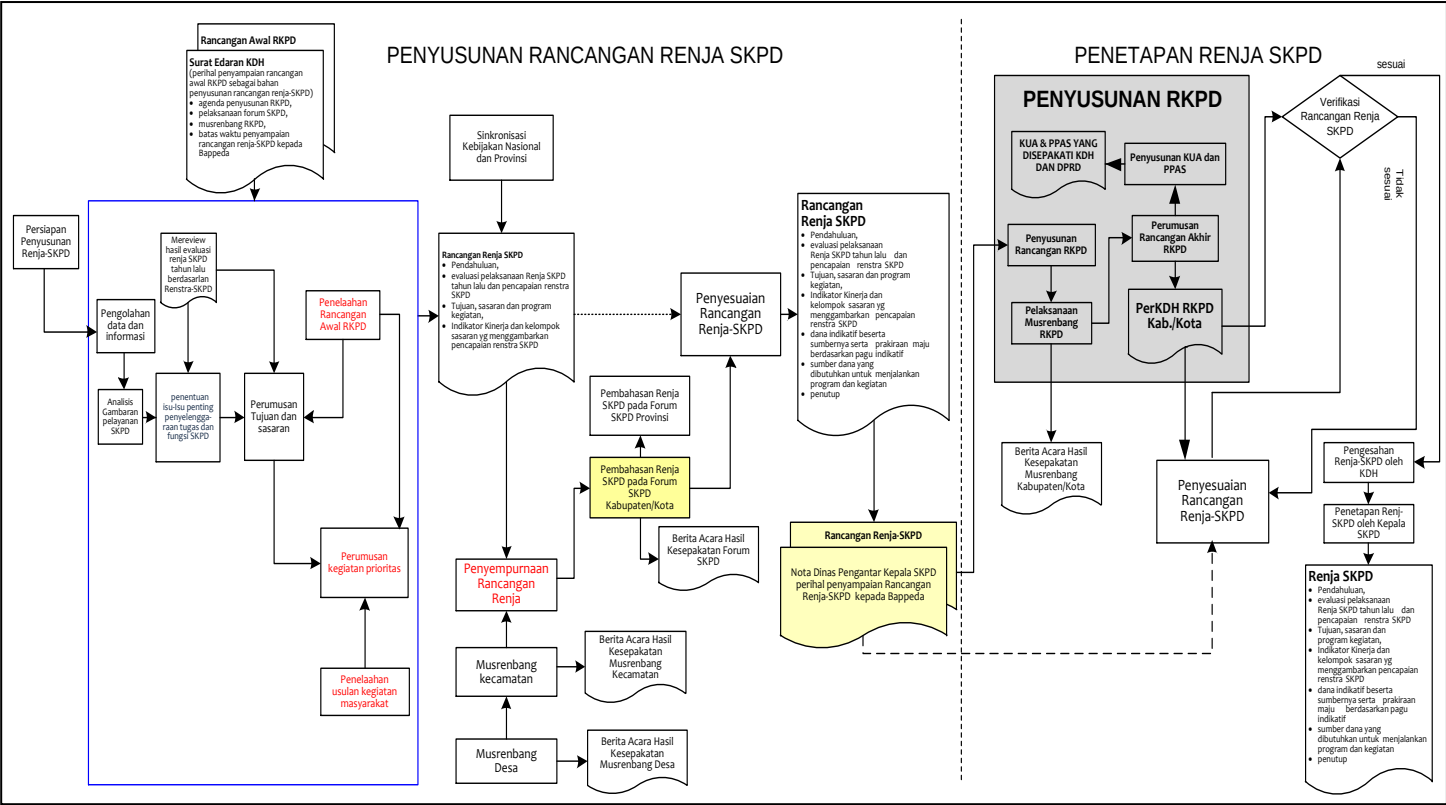
Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah dan RKPD.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah, ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah 2021 – 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya, dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RKPD Tahun 2025. Penjabaran yang dimaksud, menitik beratkan pada penyelarasan prioritas, sasaran, program dan kegiatan prioritas lingkup Perangkat Daerah yang menunjang pembangunan tahunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah, RPJP serta RPJMD, begitupun dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN. Prioritas pembangunan Tahun 2025 yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan prioritas merupakan upaya pemenuhan pencapaian target yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021- 2026.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah sebagaimana tercantum dalam gambar berikut ini :



Gambar I.1
Gambar Alur Renja

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6 berbunyi bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
21. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung nomor 15 tahun 2018);
26. Peraturan Bupati Bandung Nomor 97 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021- 2026;
27. Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 75);
28. Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bandung.
29. Surat Edaran Bupati Bandung Nomor DL.03.01/ 4382 / BAPPERIDA tentang Agenda Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2025;

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah.

Badan Pendapatan Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati Bandung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. Tahun 2021 merupakan tahun ke-1 (satu) dari pelaksanaan Rencana Strategis BAPENDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, Peraturan Bupati Bandung Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Bandung Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

2. Sekretaris membawahkan :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
- 3) Perencana Ahli Muda

3. Bidang sebanyak 4 Bidang yaitu :

1. Bidang P2O :

- 1). Sub Bidang Perencanaan Pendapatan;
- 2). Sub Bidang Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
- 3). Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

2. Bidang Penagihan, membawahkan :

- 1). Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah;
- 2). Sub Bidang Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
- 3). Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

3. Bidang Pajak I, membawahkan :

- 1). Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak I;
- 2). Sub Bidang Penetapan Pajak I;
- 3). Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

4. Bidang Pajak II, membawahkan :

- 1). Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak II;
- 2). Sub Bidang Penetapan Pajak II;
- 3). Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

5. UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I Soreang, membawahkan :

- 1). Sub Bagian Tata Usaha.

6. **UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II Dayeuhkolot**, membawahkan :
 - 1). Sub Bagian Tata Usaha.
7. **UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III Ciparay**, membawahkan :
 - 1). Sub Bagian Tata Usaha.
8. **UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV Majalaya**, membawahkan :
 - 1). Sub Bagian Tata Usaha.
9. **UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah V Rancaekek**, membawahkan :
 - 1). Sub Bagian Tata Usaha.

Adapun kewenangan urusan Badan Pendapatan Daerah di Tahun 2025, meliputi:
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, urusan SKPD Badan Pendapatan Daerah (URUSAN RUTIN) terdiri dari 1 (satu) program yaitu Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari beberapa Kegiatan yaitu :

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan memiliki Sub Kegiatan diantaranya :

- a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD
- c. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD
- d. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD
- e. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD
- f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- g. Evaluasi kinerja perangkat daerah
- h. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
- i. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan memiliki Sub Kegiatan diantaranya :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dan memiliki Sub Kegiatan diantaranya :

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada

SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan memiliki Sub Kegiatan diantaranya :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- c. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
- d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah dan memiliki Sub Kegiatan diantaranya:

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- g. Penyediaan Bahan/Material
- h. Fasilitas Kunjungan Tamu
- i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- j. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan memiliki Sub Kegiatan diantaranya :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan
- c. Pengadaan Mebel
- d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan memiliki Sub Kegiatan diantaranya :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan memiliki Sub Kegiatan diantaranya :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan memiliki Sub Kegiatan diantaranya :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Urusan Wajib terdiri dari 1 (Satu) program yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki 1 (Satu) Kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan memiliki Sub Kegiatan diantaranya :

- a. Perencanaan pengelolaan pajak daerah
- b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah I Soreang
- d. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah II Dayeuhkolot
- e. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah III Ciparay
- f. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah IV Majalaya
- g. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah V Rancaekek
- h. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- i. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- j. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- k. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- l. Penetapan Wajib Pajak Daerah
- m. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- n. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- o. Penagihan Pajak Daerah
- p. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- q. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- r. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Perubahan Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang mana dimaksudkan untuk :

- a. Memuat program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- b. Memberikan acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dalam pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan;
- c. Memberikan acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dalam mengevaluasi pencapaian kinerja dan anggaran program dan kegiatan;
- d. Memberikan acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dalam menetapkan asumsi ketercapaian indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung sampai dengan akhir tahun anggaran 2024;

Renja Badan Pendapatan Daerah ditetapkan dengan tujuan untuk menghitung proyeksi kebutuhan, besaran target pada tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, yang nantinya akan dijabarkan menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun rencana, sesuai dengan tugas fungsi dan tata kerja serta kewenangan Perangkat Daerah pada Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, meliputi :

1.1 Latar Belakang

Memuat pengertian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Visi, Misi Perangkat Daerah sesuai Renstra serta proses penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK baru, kewenangan perangkat daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan, meliputi :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini berisi Program dan Kegiatan Tahun 2025 serta Permasalahan dan Upaya Penanganan, meliputi :

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3 Program dan Kegiatan.

Bab IV Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan PD

Bab ini memuat tentang Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan Badan Pendapatan Daerah yang disusun 1 (satu) tahun sekali dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Sasaran RKPD dan capaian kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Bandung.

Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu dilakukan evaluasi untuk setiap dokumen perencanaan yang sudah berjalan. Evaluasi ini dilakukan dalam rangka penilaian terhadap pelaksanaan perencanaan, serta menetapkan target dan capaian kinerja untuk tahun selanjutnya dengan harapan adanya peningkatan setiap tahunnya. Hal ini tentu menjadi tolak ukur keberhasilan dalam proses perencanaan, apabila hasil kinerja suatu perangkat daerah dalam pelaksanaannya tidak/kurang baik, maka akan berdampak pada penurunan target dan capaian kinerja tahun selanjutnya begitu pula sebaliknya. Hasil evaluasi sangat penting sebagai bahan masukan suatu perangkat daerah untuk menentukan strategi dan kebijakan-kebijakan yang lebih baik kedepannya.

Penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 berpedoman pada hasil pencapaian kinerja badan selama 3 tahun kebelakang sampai dengan tahun n-1, dimulai dari tahun 2022 sampai dengan RKPD Tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah periode 2021-2026. Berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah (PD) selama 3 tahun kebelakang (Tahun 2022 s/d Tahun 2024), Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung memiliki tingkat **capaian realisasi sebesar 62,03% untuk Capaian Nilai SAKIP BAPENDA, Capaian Persentase Aset Dalam Kondisi Baik sebesar 64,37%, Capaian Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 60,86% dan Capaian Nilai IKM sebesar 61,55%** sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel II.1 (T-C.29)** Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 di Kabupaten Bandung.

Tabel II.1 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Bandung

Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Tingkat Realisasi	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2		4		5		6		7	8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
5	2	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai SAKIP - Aset dalam Kondisi Baik	- 401,50 -435	Poin %	- 81,66 -100	Poin %	- 81,66 - 85,00	Poin %	- 83,40 -94	-102.13% -109,30%	-84 -86	Poin %	- 249,06 -280	Poin %	-62,03% -64,37%
5	2	1	2,01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500	%	100	%	100	%	100	100%	100	%	300	%	60%
5	2	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	100%	4	Dokumen	12	Dokumen	60%
5	2	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	60%
5	2	1	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	60%
5	2	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	60%
5	2	1	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	60%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2		4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
5	2	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100%	4	Laporan	12	Laporan	60%
5	2	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	60%
5	2	1	2,02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah	500	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	300	%	60%
5	2	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	512	Orang/Bulan	104	Orang/Bulan	104	Orang/Bulan	104	Orang/Bulan	100%	104	Orang/Bulan	312	Orang/Bulan	61%
5	2	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	60%
5	2	1	2,02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	33%
5	2	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	3	Dokumen	9	Dokumen	60%
5	2	1	2,02	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	300	%	0	%	0	%	0	%	100%	100	%	100	%	33%
5	2	1	2,03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	Dokumen	33%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2		4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
5	2	1	2,03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	100%	1	Laporan	1	Laporan	33%
5	2	1	2,05	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	500	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	300	%	60%
5	2	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10	Paket	2	Paket	2	Paket	2	Paket	100%	2	Paket	6	Paket	60%
5	2	1	2,05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	33%
5	2	1	2,05	6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	2	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0%	1	Orang	1	Orang	50%
5	2	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	900	Orang	180	Orang	180	Orang	180	Orang	100%	180	Orang	540	Orang	60%
5	2	1	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	900	Orang	180	Orang	180	Orang	180	Orang	100%	180	Orang	540	Orang	60%
5	2	1	2,06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	500	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	300	%	60%
5	2	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	3	Paket	60%
5	2	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	100%	5	Paket	15	Paket	60%
5	2	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15	Paket	3	Paket	3	Paket	3	Paket	100%	3	Paket	9	Paket	60%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi							
1					2		4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
5	2	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	3	Paket	60%
5	2	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	3	Paket	60%
5	2	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100%	4	Dokumen	12	Dokumen	60%
5	2	1	2,06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0%	1	Paket	1	Paket	33%
5	2	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	60%
5	2	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	60%
5	2	1	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	100%
5	2	1	2,08	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300	%	0	%	0	%	0	%	100%	100	%	100	%	33%
5	2	1	2,08	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	1	Unit	1	Unit	33%
5	2	1	2,08	2	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	1	Unit	1	Unit	33%
5	2	1	2,08	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0%	1	Paket	1	Paket	33%
5	2	1	2,08	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	1	Unit	1	Unit	33%
5	2	1	2,08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	300	%	60%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2		4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
5	2	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	60%
5	2	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	60%
5	2	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	60%
5	2	1	2,09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	500	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	300	%	60%
5	2	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	3	Unit	60%
5	2	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	630	Unit	126	Unit	126	Unit	126	Unit	100%	126	Unit	378	Unit	60%
5	2	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	330	Unit	66	Unit	66	Unit	66	Unit	100%	66	Unit	198	Unit	60%
5	2	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	3	Unit	60%
5	2	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	3	Unit	60%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1					2		4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
5	2	4	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	- Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah - Nilai IKM	254,25 417,5	% Poin	- 55,01 - 83,49	% Poin	- 50,27 - 83,00	% Poin	- 49,43 - 89,49	% Poin	100%	- 50,30 -84	% Poin	- 154,74 - 256,98	% Poin	60,86% 61,55%	
5	2	4	2,01	0	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Prosentase Target Pajak Daerah	500	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	300	%	60%	
5	2	4	2,01	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	10	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	6	Dokumen	60%	
5	2	4	2,01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	15	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	3	Dokumen	9	Dokumen	60%	
5	2	4	2,01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah I Soreang	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	60%	
5	2	4	2,01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah II Dayeuhkolot	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	60%	
5	2	4	2,01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah III Ciparay	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	60%	
5	2	4	2,01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah IV Majalaya	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	60%	
5	2	4	2,01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah V Rancaekek	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	60%	
5	2	4	2,01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	45	Unit	9	Unit	9	Unit	9	Unit	100%	9	Unit	27	Unit	60%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2		4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
5	2	4	2,01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	40	Jenis Pajak	8	Jenis Pajak	8	Jenis Pajak	8	Jenis Pajak	100%	8	Jenis Pajak	24	Jenis Pajak	60%
5	2	4	2,01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	60%
5	2	4	2,01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	10	Jenis Pajak	2	Jenis Pajak	2	Jenis Pajak	2	Jenis Pajak	100%	2	Jenis Pajak	6	Jenis Pajak	60%
5	2	4	2,01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	60%
5	2	4	2,01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	70	Layanan	14	Layanan	14	Layanan	14	Layanan	100%	14	Layanan	42	Layanan	60%
5	2	4	2,01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	10	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	6	Dokumen	60%
5	2	4	2,01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	50	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	100%	10	Dokumen	30	Dokumen	60%
5	2	4	2,01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	10	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	6	Dokumen	60%
5	2	4	2,01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	60%
5	2	4	2,01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	60%

Berdasarkan **tabel T-C.29** dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah selama 3 tahun kebelakang sampai dengan Tahun 2024 mempunyai 2 Program yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah kegiatan sebanyak 8 kegiatan dengan tingkat capaian realisasi untuk Nilai SAKIP Bapenda sebesar **62,03%** dan untuk Persentase Aset dalam Kondisi Baik sebesar **64,37%** dengan rincian kegiatan yang terdiri dari :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki 7 sub kegiatan dengan tingkat capaian realisasi sebesar **60%**.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki 4 sub kegiatan dengan tingkat capaian realisasi sebesar **60%**.
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah memiliki 2 sub kegiatan dengan tingkat capaian realisasi sebesar **33%**.
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah memiliki 5 sub kegiatan dengan tingkat capaian realisasi sebesar **60%**.
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki 10 sub kegiatan dengan tingkat capaian realisasi sebesar **60%**.
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki 4 sub kegiatan dengan tingkat capaian realisasi sebesar **33%**.
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki 3 sub kegiatan dengan tingkat capaian realisasi sebesar **60%**.
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki 5 sub kegiatan dengan tingkat capaian realisasi sebesar **60%**.
2. Program Pendapatan Daerah dengan jumlah 1 kegiatan dengan tingkat capaian untuk Indikator Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah realisasi sebesar **60,86%** dan Nilai IKM realisasi capaian sebesar **61,55%**, yang terdiri dari 14 Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Perencanaan pengelolaan pajak daerah dengan tingkat capaian realisasi sebesar **60%**.
 - b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dengan tingkat capaian realisasi sebesar **60%**.
 - c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah I Soreang dengan tingkat capaian realisasi sebesar **60%**.
 - d. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah II Dayeuhkolot dengan tingkat capaian realisasi sebesar **60%**.
 - e. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah III Ciparay dengan tingkat capaian realisasi sebesar **60%**.
 - f. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah IV Majalaya dengan tingkat capaian realisasi sebesar **60%**.

- g. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah V Rancaekek dengan tingkat capaian realisasi sebesar **60%**.
- h. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dengan tingkat capaian realisasi sebesar **60%**.
- i. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah dengan tingkat capaian realisasi sebesar **60%**.
- j. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dengan tingkat capaian realisasi sebesar **60%**.
- k. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan tingkat capaian realisasi sebesar **60%**.
- l. Penetapan Wajib Pajak Daerah dengan tingkat capaian realisasi sebesar **60%**.
- m. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan tingkat capaian realisasi sebesar **60%**.
- n. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah dengan tingkat capaian realisasi sebesar **60%**.
- o. Penagihan Pajak Daerah dengan tingkat capaian realisasi sebesar 60%.
- p. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dengan tingkat capaian realisasi sebesar **60%**.
- q. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dengan tingkat capaian realisasi sebesar **60%**.
- r. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan tingkat capaian realisasi sebesar **60%**.

Untuk mengetahui strategi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung untuk peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) maka dilakukan analisis kemampuan organisasi dengan menggunakan teknik analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities* dan *Threats*), baik terhadap kondisi organisasi institusi maupun terhadap program dan kegiatan yang dilakukan.

A. Kekuatan (Strength):

1. Memiliki legalitas organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan; (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung nomor 15 tahun 2018), dan diantaranya membentuk Badan Pendapatan Daerah;
2. Memiliki alokasi anggaran belanja langsung berdasarkan DPA untuk tahun 2023 pada Badan Pendapatan Daerah sebesar **Rp77.985.946.227,00** dan untuk tahun 2024 sebesar **Rp87.069.234.473,00** (APBD) yang menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah terdiri dari Belanja

Program/Kegiatan Rutin Perangkat Daerah sebesar **Rp66.014.853.013,00** dan Belanja Program/Kegiatan Urusan sebesar **Rp21.054.381.460,00** Selanjutnya untuk anggaran Tahun 2025 memiliki Perubahan Rencana Kerja sebesar **Rp. 95.563.926.661,00** pada RKPD Perubahan Tahun 2025.

3. Badan Pendapatan Daerah memiliki struktur organisasi terdiri dari : 1 Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang, 8 (Delapan) Kasubbid, 1 (satu) Kasubag, 1 (satu) Perencana Ahli Muda, 5 (lima) Analis Keuangan Pusat dan Daerah 5 (lima) Kepala UPTD dan 5 (lima) Kasubag Tata Usaha UPTD dan total sebanyak 74 (tujuh puluh empat) Staf/JFU dengan total karyawan Badan Pendapatan Daerah Desember Tahun 2023 adalah PNS sebanyak 105 orang. Sedangkan untuk Pegawai Harian Lepas (PHL) sebanyak 93 orang dan 12 orang Tenaga Ahli;
4. Badan Pendapan Daerah latar belakang pendidikan SDM yang bervariasi, terdiri dari 12 orang dengan jenjang pendidikan S2, 53 orang dengan jenjang pendidikan S1, 8 orang dengan jenjang pendidikan D3, 31 orang dengan jenjang pendidikan SMU/SMK dan 1 orang dengan jenjang pendidikan SLTP/SMP;
5. Badan Pendapatan Daerah berkantor di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung;
6. Memiliki 9 unit mobil Mobil Layanan Pajak Daerah, Mobil Mini Bus Satgas Penagihan (Hiace) 1 Unit, 1 unit pick up, 4 unit Mobil (Grandmax) untuk Penagihan oleh Satgas Penagihan sehingga jumlah kendaraan dinas operasional Pajak Daerah sebanyak 15 unit;
7. Memiliki Kepala Dusun (Kadus) sebanyak 1.095 Orang, Kolektor Pajak sebanyak 280 Orang dan 4.235 Orang Kader Pendapatan Daerah sebagai Penyampaian SPPT Pajak II (PBB dan BPHTB) di Desa dan Kecamatan;
8. Memiliki dokumen RENSTRA 2021 - 2026 dan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman sinergitas program pendanaan lima tahunan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung;
9. Memiliki beberpa aplikasi yang akan menunjang terhadap Optimalisasi Pendapatan Daerah yaitu :
 - A. Asiknya BEDAS (Aplikasi Sistem Insentif dan Kehadiran Yang BERbasis hasil Dan Kinerja non ASn);
 - B. SIP PAD (Sistem Aplikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah);
 - C. E-SPTPD (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah);
 - D. E-PBB;
 - E. SIM BPHTB/Si BEDAS TANGGUH;
 - F. Payment Channel;
 - G. PAT Online.

Kelemahan (Weaknessess):

1. Tidak optimalnya kinerja yang dilakukan karena terjadinya ketimpangan, tumpang tindih, dan masih kurang jelasnya Tupoksi perbidang;
2. Kecenderungan menurunnya kualitas sumber daya manusia dengan kualifikasi teknis, karena para tenaga teknis yang berpengalaman sudah mulai banyak yang memasuki usia pensiun dan tidak segera tergantikan;
3. Ruang kerja para karyawan relatif sempit tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Belum optimalnya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Pajak Daerah;
5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

B. Peluang (Opportunities)

1. Dengan luas wilayah 176.238,67 Ha, Kabupaten Bandung merupakan Kabupaten dengan wilayah yang sangat luas di Jawa Barat. Hal ini menyebabkan Kabupaten Bandung mempunyai potensi fleksibilitas pengembangan wilayah yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
2. Letak Kabupaten Bandung berbatasan dengan ibukota Propinsi Jawa Barat. Hal ini berarti jarak ke pusat perniagaan dan pusat pertumbuhan provinsi cukup dekat.

C. Ancaman (Threats)

1. Terlambatnya rekrutmen tenaga ahli teknis/lapangan dapat berpotensi pelaksanaan kegiatan tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan;
2. Minimnya diklat teknis dapat memperparah kesenjangan alih pengetahuan dan peningkatan kapasitas karyawan;
3. Sumber pendapatan yang merupakan faktor kunci dalam peningkatan pembangunan di kabupaten Bandung;
4. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban;
6. Resiko Kebocoran dalam Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung, sebagai Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi Urusan Penunjang Keuangan. Berdasarkan Renstra periode 2025-2029, sasaran Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Bandung adalah meningkatnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung adalah salah satu badan yang melakukan pelayanan kepada Perangkat Daerah maupun langsung kepada masyarakat, yaitu memungut dan menerima pembayaran Pajak Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa BAPENDA mempunyai peran strategis sebagai Perangkat Daerah (PD) juga sebagai Koordinator yang melaksanakan penyusunan rancangan akhir peraturan daerah tentang APBD, peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Hasil analisa pelayanan di Badan Pendapatan Daerah terdapat indikator kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

INDIKATOR KEGIATAN & SUB KEGIATAN TAHUN 2024 dan 2025 :

1. Prosentase Permenuhan Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
4. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
5. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
6. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
7. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9. Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
10. Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa oleh lingkup Perangkat Daerah
11. Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah
12. Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
13. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
14. Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

15. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
16. Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
17. Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
18. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
19. Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah
20. Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
21. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
22. Jumlah Pegawai Pensiun yang dipulangkan
23. Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
24. Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
25. Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
26. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
27. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
28. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan
29. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan
30. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan
31. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan
32. Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan
33. Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
34. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
35. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
36. Prosentase Permenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
37. Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan
38. Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan
39. Jumlah Paket Mebel yang disediakan
40. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan
41. Prosentase Permenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
42. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
43. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
44. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan

45. Prosentase Permenuhan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
46. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
47. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
48. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
49. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
50. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
51. Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
52. Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
53. Jumlah Target Pajak Daerah
54. Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak I
55. Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak II
56. Jumlah Penerimaan Piutang Pajak Daerah
57. Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah
58. Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
59. Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah I Soreang
60. Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah II Dayeuhkolot
61. Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah III Ciparay
62. Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah IV Majalaya
63. Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah V Rancaekek
64. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
65. Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
66. Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
67. Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya
68. Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
69. Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
70. Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi
71. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah

- 72. Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- 73. Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
- 74. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

Keberhasilan yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 ditentukan dari hasil Analisis Kinerja Pelayanan pada BAPENDA yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan, dapat dilihat pada **tabel II.2 (T-C.30)**.

Pada **tabel T-C.30** dapat digambarkan bahwa Proyeksi Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah untuk Tahun 2025 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu indikator Nilai SAKIP BAPENDA dan Presentase Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tidak hanya itu, Proyeksi Capaian Kinerja untuk indikator Persentase Aset dalam Kondisi Baik dan Nilai IKM juga mengalami peningkatan dari Tahun 2023 s/d Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja dan target proyeksi Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 diukur dari hasil Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 s.d 2024 sesuai dengan **tabel II.2 (T-C.30)**, sebagai bahan untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah.

TABEL T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bandung

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai SAKIP BAPENDA			Poin	81,66	83,40	84,00	84,50	83,40	85,20	81,86	81,96	
2	Persentase Aset dalam Kondisi Baik			Persen (%)	86,00	87,00	88,00	89,00	94,00	96,83	88,00	89,00	
3	Nilai IKM			Poin	83,00	83,50	84,00	84,50	89,49	89,80	84,00	84,50	
4	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah			Persen (%)	50,27	50,30	50,35	50,40	50,20	50,48	51,43	51,94	IKU Bapenda
5	Persentase Pemuktahiran Potensi Pajak Daerah			Persen (%)	2,20	2,30	2,40	2,50	2,44	2,47	2,40	2,50	
6	Total Pendapatan Pemerintah sebagai Proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	Pendapatan Pemerintah Daerah Sebagai Proporsi Terhadap PDB		Persen (%)	0,84	0,85	0,86	0,87	0,84	0,90	0,86	0,87	SDG's
7	Rasio Penerimaan Pajak Daerah terhadap PDB	Pendapatan Pajak Pemerintah Daerah Sebagai Proporsi Terhadap PDB		Persen (%)	0,41	0,42	0,43	0,44	0,41	0,45	0,43	0,44	SDG's

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Pendapatan Daerah menghadapi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, antara lain :

1. Terbatasnya kualitas Sumber Daya Aparatur sesuai standar kebutuhan unit kerja dan belum optimalnya penempatan Sumber Daya Aparatur pada masing-masing unit kerja BAPENDA yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi;
2. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi elektronik pelayanan secara *online*;
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan pajak daerah;
4. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam pemenuhan kewajiban sebagai wajib pajak;
5. Belum optimalnya sistem pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan pajak daerah;
6. Belum optimalnya penyelesaian piutang pemerintah daerah.

Selanjutnya selain isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah menghadapi hambatan-hambatan yang cukup berarti yaitu :

1. Terbatasnya jumlah tenaga yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk pendataan sumber pendapatan pajak daerah;
2. Belum optimalnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya;
3. Belum optimalnya penerapan sanksi bagi WP maupun bagi karyawan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
4. Belum optimalnya pendataan potensi objek pajak daerah;
5. Terbatasnya SDM yang memenuhi kualifikasi ahli dalam mengelola BPHTB dan PBB-P2;
6. Terbatasnya lembaga yang menyelenggarakan Diklat/Bimtek PBB.

Dalam meningkatkan pelayanan, Badan Pendapatan Daerah menghadapi berbagai tantangan seperti :

1. Belum optimalnya kualitas SDM yang sesuai standar kebutuhan unit kerja dan belum optimalnya penempatan SDM pada masing-masing unit kerja BAPENDA sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi;
2. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana, baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan pajak daerah dan pelayanan administrasi perbendaharaan;
4. Belum optimalnya perencanaan, pengendalian, dan operasional pajak daerah;
5. Belum optimalnya sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan daerah;

6. Belum adanya Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan (Akuntan, Penilai PBB P2, Juru Sita Pajak);
7. Belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
8. Belum optimalnya penerimaan pajak daerah.

Faktor peluang yang perlu dimanfaatkan dalam meningkatkan pelayanan SKPD adalah sebagai berikut :

1. Adanya potensi pendapatan yang cukup besar di Kabupaten Bandung;
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan, pelaporan dan informasi keuangan daerah;
3. Adanya reformasi birokrasi disegala bidang, termasuk pengelolaan keuangan;
4. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Adanya perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan analisis dari tantangan dan peluang dalam pelayanan SKPD, maka ditindaklanjuti dengan perumusan program dan kegiatan untuk tahun 2025 yang direncanakan, yaitu :

1. Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal yang ada di Lingkungan Pemda Kabupaten Bandung maupun di luar Pemda Kabupaten Bandung;
2. Peningkatan sarana dan prasarana baik dari segi kuantitas dan kualitas bagi pegawai BAPENDA;
3. Peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah kepada wajib pajak dan pelayanan administrasi pelayanan perbendaharaan;
4. Peningkatan pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan operasional pajak daerah dengan memanfaatkan potensi pendapatan antara lain dari sektor pajak yang cukup besar di Kabupaten Bandung;
5. Pengangkatan pegawai dari BAPENDA untuk memegang Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan (Akuntan, Penilai PBB P2 dan Juru Sita) dengan SK Bupati;
6. Pengoptimalisasian pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
7. Pengoptimalisasian penerimaan pajak daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada sub bagian ini, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) awal dibandingkan dengan RKPD hasil analisis kebutuhan perangkat daerah. Hal ini harus dilaksanakan karena terdapat perbedaan pada angka pagu indikatif/dana kebutuhan yang terjadi dengan adanya beberapa kegiatan yang memerlukan dana lebih, sehingga anggaran pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 sebesar **Rp. 110.190.975.907,00** sementara hasil analisis yang dibutuhkan pada perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 sebesar **Rp. 95.563.926.661,00**. Selain itu, ada beberapa anggaran yang juga disesuaikan dengan kebutuhan belanja untuk penyesuaian anggaran belanja SKPD Tahun 2025. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan dengan dana yang sesuai kebutuhan di Badan Pendapatan Daerah antara lain sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah membutuhkan pagu sebesar **Rp. 1.096.633.812,00**.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah membutuhkan pagu sebesar **Rp. 54.328.870.787,00**.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah membutuhkan pagu sebesar **Rp. 7.806.450,00**.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah membutuhkan pagu sebesar **Rp. 362.998.800,00**.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah membutuhkan pagu sebesar **Rp.3.577.175.701,00**.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah membutuhkan pagu sebesar **Rp. 1.448.048.976,00**.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah membutuhkan pagu sebesar **Rp. 8.411.830.819,00**.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah membutuhkan pagu sebesar **Rp 2.664.839.860,00**.
9. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah membutuhkan pagu sebesar **Rp. 1.092.634.683,00**.

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah membutuhkan pagu sebesar **Rp. 22.573.086.773,00**.

Untuk lebih jelasnya, review terhadap Rancangan Awal RKPD dengan dana yang sesuai dengan kebutuhan dapat dilihat pada **Tabel II.3 (T-C.31)** berikut ini :

Tabel TC.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Bandung

Badan Pendapatan Daerah											
No .	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Setelah Pemetaan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab.Bandung	- Nilai SAKIP - Aset dalam Kondisi Baik	- 85,6 poin - 88,00	81.102.582.489,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab.Bandung	- Nilai SAKIP - Aset dalam Kondisi Baik	- 85,6 poin - 88,00	72.990.839.888,00	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Bandung	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.190.484.937,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Bandung	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.096.633.812,00	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	835.936.397,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	777.361.397,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	6.990.000,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	12.975.625,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	7.720.000,00	
6	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	6.840.000,00	

No .	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Setelah Pemetaan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.140.000,00	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	230.634.790,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	228.146.790,00	
9	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	25.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	15.760.000,00	
10	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	27.962.500,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	27.962.500,00	
11	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	44 Data	27.975.625,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	44 Data	18.713.125,00	
12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Bandung	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah	100%	61.537.258.647,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Bandung	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah	100%	54.328.870.787,00	
13	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang	61.383.378.022,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang/bulan	54.203.988.287,00	
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	31.275.625,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	18.926.000,00	

No .	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Setelah Pemetaan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.500.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.500.000,00	
16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Dokumen	120.105.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	103.456.500,00	
17	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab.Bandung	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	140.525.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab.Bandung	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	7.806.450,00	
18	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.678.750,00	
19	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	40.525.000,00	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.127.700,00	
20	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Bandung	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100%	729.998.800,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Bandung	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100%	362.998.800,00	
21	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	264.950.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	264.950.000,00	
22	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	168.015.300,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	68.015.300,00	

No .	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Setelah Pemetaan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kab.Bandung	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	1 Orang	95.000.000,00	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kab.Bandung	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	1 Orang	0,00	
24	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Bandung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	180 Orang	172.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Bandung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	180 Orang	0,00	
25	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	180 Orang	30.033.500,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	180 Orang	30.033.500,00	
26	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Bandung	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	3.665.838.301,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Bandung	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	3.577.175.701,00	
27	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	206.909.800,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	206.909.800,00	
28	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	288.020.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	288.020.000,00	
29	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	736.804.500,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	736.804.500,00	
30	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.284.119.700,50	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.430.245.900,50	
31	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Bandung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	405.029.950,50	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Bandung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	405.029.950,50	
32	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	57.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	57.000.000,00	
33	Penyediaan Bahan/Material	Kab.Bandung	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	263.093.100,00	Penyediaan Bahan/Material	Kab.Bandung	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	224.933.100,00	

No .	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Setelah Pemetaan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.000.000,00	
35	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	394.861.250,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	199.517.450,00	
36	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.715.000,00	
37	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Bandung	Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.467.321.376,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Bandung	Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20%	1.448.048.976,00	
38	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	5.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	5.000,00	
39	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	5.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	5.000,00	
40	Pengadaan Mebel	Kab.Bandung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	109.523.000,00	Pengadaan Mebel	Kab.Bandung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	109.523.000,00	
41	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Bandung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.357.788.376,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Bandung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.338.515.976,00	
42	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Bandung	Prosentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	8.176.550.845,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Bandung	Prosentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	8.411.830.819,00	
43	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	37.520.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	28.000.000,00	

No .	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Setelah Pemetaan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	670.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	669.999.974,00	
45	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	7.469.030.845,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.713.830.845,00	
46	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Bandung	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	3.101.969.900,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Bandung	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	2.664.839.860,00	
47	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	26.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	26.000.000,00	
48	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	126 Unit	248.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	126 Unit	153.900.000,00	
49	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	66 Unit	520.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	66 Unit	437.670.000,00	
50	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.539.969.900,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.184.997.460,00	
51	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	768.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	862.272.400,00	

No .	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Setelah Pemetaan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Bandung	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	1.092.634.683,00	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Bandung	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	1.092.634.683,00	
53	Penyediaan Gaji dan Tunjangan kepala daerah dan wakil Kepala Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	1.092.634.683,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan kepala daerah dan wakil Kepala Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	1.092.634.683,00	
54	Jumlah 1				81.102.582.489,00	Jumlah 1				72.990.839.888	
55	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab.Bandung	-Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah -Nilai IKM	50,35% 84%	29.088.393.418,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab.Bandung	-Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah -Nilai IKM	50,35% 84%	22.573.086.773,00	
56	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kab.Bandung	Prosentase Target Pajak Daerah	100%	29.088.393.418,00	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Target Pajak Daerah Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak I Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak II Jumlah penerimaan piutang pajak daerah	740.425.300.000,00 295.855.700.000,00 328.091.200.000,00 26.320.000.000,00	22.573.086.773,00	
57	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	955.328.933,00	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Dokumen	650.638.033,00	
58	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Aplikasi	693.779.713,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	451.472.413,00	
59	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah I Soreang	12 bulan	833.029.070,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah I Soreang	12 Laporan	690.321.945,00	

No .	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Setelah Pemetaan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah II Dayeuhkolot	12 bulan	583.567.470,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah II Dayeuhkolot	12 Laporan	350.719.945,00	
61	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah III Ciparay	12 bulan	583.430.070,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah III Ciparay	12 Laporan	312.700.945,00	
62	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah IV Majalaya	12 bulan	643.466.670,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah IV Majalaya	12 Laporan	282.697.945,00	
63	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah V Rancaekek	12 bulan	553.427.070,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah V Rancaekek	12 Laporan	282.697.945,00	
64	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	9 unit	1.131.006.800,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	9 Unit	139.896.780,00	
65	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	8 Jenis Pajak	1.812.884.400,00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	8 Laporan	1.086.566.400,00	
66	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Dokumen	799.666.301,00	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	412.950.151,00	

No .	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Setelah Pemetaan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab.Bandung	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2 Jenis Pajak	15.894.729.750,00	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab.Bandung	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2 Obyek Pajak	15.298.654.750,00	
68	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	1.100.764.101,00	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	672.648.001,00	
69	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	14 Layanan	75.950.000,00	
70	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	2 Dokumen	150.000.000,00	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	2 Dokumen	143.550.000,00	
71	Penagihan Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1.695.129.100,00	Penagihan Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	984.241.600,00	
72	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2 Dokumen	408.566.870,00	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	222.701.870,00	
73	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	1.139.617.100,00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	504.678.050,00	
74	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	10.000.000,00	
	Jumlah 2				29.088.393.418,00	Jumlah 2				22.573.086.773,00	
	JUMLAH TOTAL				110.190.975.907,00	JUMLAH TOTAL				95.563.926.661,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Renja BAPENDA dapat ditelaah bahwa setiap program dan kegiatan dapat terakomodir secara keseluruhan untuk Tahun Anggaran 2025. Untuk lebih jelasnya, berikut rumusan kebutuhan program dan kegiatan Tahun 2025 hasil review Rancangan Akhir RKPD Perubahan pada **tabel II.4 (T-C.32)** :

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Bandung

Badan Pendapatan Daerah

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Voume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab.Bandung	- Nilai SAKIP - Aset dalam Kondisi Baik	- 85,6 poin - 88,00	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Bandung	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kinerja perangkat daerah	100%	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	
6	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	
7	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	
9	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	
10	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	
11	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	44 Data	
12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Bandung	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah	100%	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Voume	Catatan
1	2	3	4	5	6
13	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang	
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	
15	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	
16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Dokumen	
17	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab.Bandung	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	
18	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	
19	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
20	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Bandung	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100%	
21	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	
22	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	
23	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kab.Bandung	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	1 Orang	
24	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Bandung	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	180 Orang	
25	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	180 Orang	
26	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Bandung	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	
27	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
28	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	
29	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	
30	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Voume	Catatan
1	2	3	4	5	6
31	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Bandung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	
32	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	
33	Penyediaan Bahan/Material	Kab.Bandung	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	
34	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	
35	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	
36	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	
37	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Bandung	Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20%	
38	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	
39	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	
40	Pengadaan Mebel	Kab.Bandung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	
41	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Bandung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	
42	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Bandung	Prosentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	
43	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	
44	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	
45	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	
46	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Bandung	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	
47	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	
48	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	126 Unit	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Voume	Catatan
1	2	3	4	5	6
49	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	66 Unit	
50	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
51	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
52	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Bandung	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	
53	Penyediaan Gaji dan Tunjangan kepala daerah dan wakil Kepala Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	
54	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab.Bandung	- Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah - Nilai IKM	-50,35% -84	
55	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Target Pajak Daerah Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak I Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak II Jumlah penerimaan piutang pajak daerah	740.425.300.000,00 295.855.700.000,00 328.091.200.000,00 26.320.000.000,00	
56	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Dokumen	
57	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	
58	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	
59	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	9 Unit	
60	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	8 Laporan	
61	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	
62	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab.Bandung	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2 Obyek Pajak	
63	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	
64	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	14 Layanan	
65	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	2 Dokumen	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Voume	Catatan
1	2	3	4	5	6
66	Penagihan Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	
67	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	
68	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	
69	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	

Rencana Kinerja Tahunan SKPD/PD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD, yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Berdasarkan hasil kajian evaluasi internal kami, maka ada perubahan/perbaikan untuk tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari berbagai program dan kegiatan Badan, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian kinerja 1 (satu) sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah ditunjang dengan efektivitas penggunaan berbagai sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang meliputi dana, SDM, peralatan dan waktu pelaksanaannya.

Anggaran Badan

Anggaran Program yang menunjang terhadap indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 95.563.926.661,00**.

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pendapatan Daerah **Per 31 Desember 2023** sebanyak **105 orang**, dengan klasifikasi berdasarkan golongan, jabatan serta pendidikan sebagai berikut :

Berdasarkan Golongan

1.	Golongan IV/c	1 orang
2.	Golongan IV/b	0 orang
3.	Golongan IV/a	5 orang
4.	Golongan III/d	16 orang
5.	Golongan III/c	17 orang
6.	Golongan III/b	16 orang
7.	Golongan III/a	36 orang
8.	Golongan II/d	14 orang
9.	Golongan II/c	0 orang
10.	Golongan II/b	0 orang
11.	Golongan II/a	0 orang
12.	Golongan I/d	0 orang
J u m l a h		105 orang

Berdasarkan Jenis Jabatan

1.	Kepala Badan (Eselonering II c)	1 orang
2.	Sekretaris (Eselonering III a)	1 orang
3.	Kepala Bidang (Eselonering III b)	4 orang
4.	Kepala Sub Bagian (Eselonering IV a)	3 orang
5.	Kepala Seksi (Eselonering IV a)	12 orang
6.	Kepala UPTD (Eselonering IV a)	5 orang
7.	Kepala Sub Bagian pada UPTD (Eselonering IV b)	5 orang
8.	Kelompok Jabatan Fungsional Umum Tertentu	- orang
9.	Pelaksana (Staf) / JFU	74 orang
J u m l a h		105 orang

Berdasarkan Jenis Pendidikan

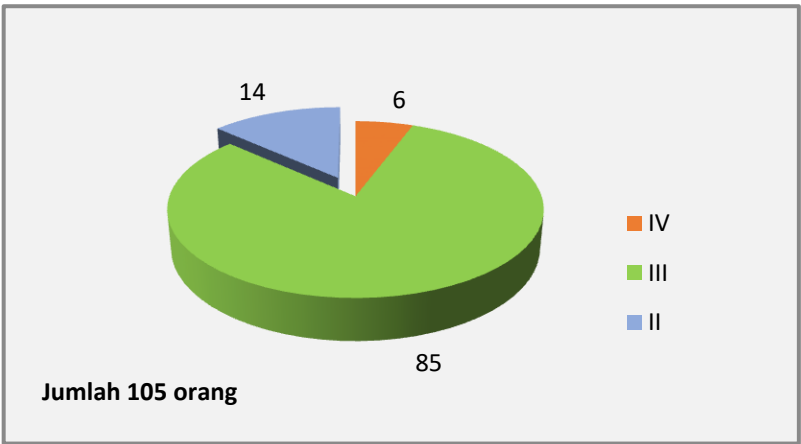
1.	Pasca Sarjana	12 orang
2.	Sarjana	53 orang
3.	Diploma IV	- orang
4.	Diploma III	8 orang
5.	Diploma II	- orang
6.	Diploma I	- orang
7.	SLTA Kejuruan	- orang
8.	SLTA UMUM	31 orang
9.	SLTP	1 orang
10	SD	- orang
J u m l a h		105 orang

Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang terdapat di BAPENDA terdiri dari PNS dan Non PNS yang dirinci berdasarkan golongan, tingkat pendidikan dan jenis pendidikan yang diikuti, baik pendidikan formal maupun non formal sebagaimana grafik-grafik di bawah ini:

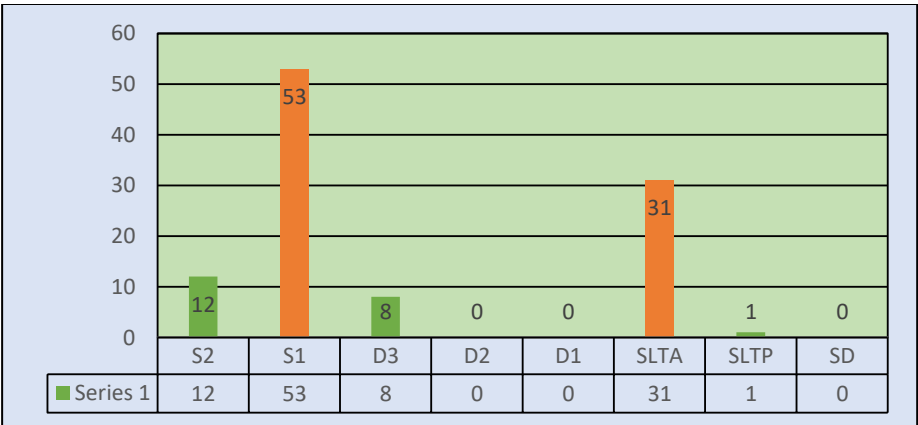
Gambar 1.2
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan



Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat bahwa sumber daya manusia pada Badan Pendapatan Daerah berdasarkan golongan terbagi menjadi tiga, yaitu golongan II, III dan IV. Untuk PNS pada golongan II berjumlah 14 orang, PNS pada golongan III berjumlah 85 orang dan PNS pada golongan IV berjumlah 6 orang.

Gambar 1.3

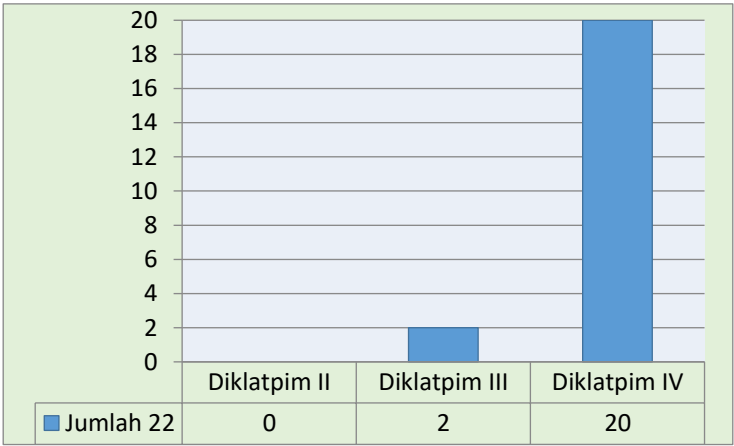
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Badan Pendapatan Daerah diperkuat dengan keragaman tingkat pendidikan yang dimiliki setiap pegawai, berdasarkan gambar di atas dapat dilihat jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 12 orang, S1 sebanyak 53 orang, D3 sebanyak 8 orang, SLTA sebanyak 31 orang dan SLTP sebanyak 1 orang.

Gambar 1.4

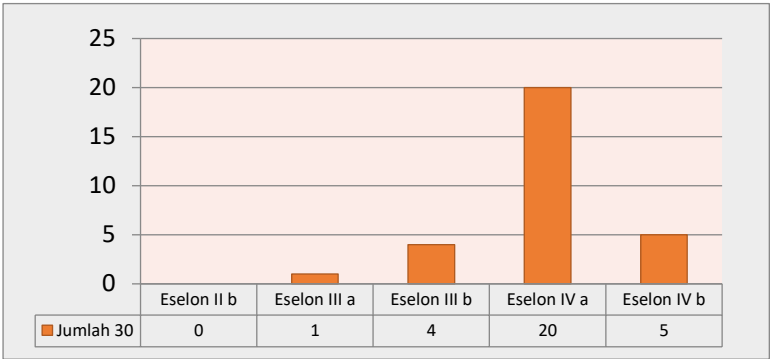
Jumlah PNS Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural



Dalam jenjang jabatan struktural tertentu untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan diperlukan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur, yang diperoleh melalui Diklat Kepemimpinan. Dapat dilihat pada gambar 1.4 bahwa jumlah PNS Badan Pendapatan Daerah yang telah mengikuti Diklat Struktural sebanyak 22 orang, dengan rincian 2 orang telah mengikuti Diklatpim III dan 20 orang telah mengikuti Diklatpim IV.

Gambar 1.5

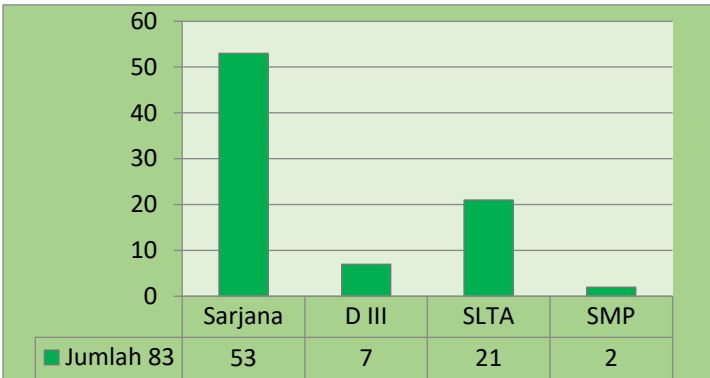
Jumlah PNS Yang Menduduki Eselon



Sebanyak 30 PNS pada Badan Pendapatan Daerah yang menduduki Eselon terdiri dari Eselon III a (1 orang), Eselon III b (4 orang), Eselon IV a (20 orang) dan Eselon IV b (5 orang).

Gambar 1.6

Jumlah Pegawai Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Selain daripada PNS yang menjadi sumber daya utama pada Badan Pendapatan Daerah, tenaga Non PNS juga menjadi unsur yang sangat berperan penting terhadap kelancaran operasional Badan Pendapatan Daerah. Tenaga Non PNS berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana terdapat pada gambar 1.6 terdiri dari Non PNS dengan pendidikan Sarjana berjumlah 53 orang, D III berjumlah 7 orang, SLTA berjumlah 21 orang dan untuk jenjang pendidikan SMP berjumlah 2 orang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, bahwa Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan.

Sarana Penunjang (Peralatan)

Sarana penunjang/peralatan (Aset) yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah berdasarkan hasil rekonsiliasi aset sampai dengan **31 Desember 2023** terdiri dari :

ASET TETAP TAHUN 2024

Aset Tetap dalam Kondisi Baik	Rp. 35.350.400.345,00
Jumlah	Rp. 35.350.400.345,00

ASET LAINNYA TAHUN 2024

Aset Kondisi Rusak Berat	Rp. 1.155.232.176,00
Jumlah	Rp. 1.155.232.176,00

Analisis Program/Kegiatan

Analisis program/kegiatan yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dalam rangka menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja sasaran strategis selama tahun 2023 s/d tahun 2025 Triwulan I dapat dilihat berdasarkan hasil rekapitulasi pagu anggaran dan realisasi anggaran program kegiatan berdasarkan indikator kinerja. Terdapat 2 program di Bapenda Kabupaten Bandung, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, serta 4 indikator kinerja antara lain Nilai SAKIP, Persentase Aset dalam Kondisi Baik, Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Berdasarkan tabel di bawah ini, secara umum selama tahun 2023 s/d tahun 2024 pencapaian target indikator kinerja yang ada di Bapenda Kabupaten Bandung cenderung fluktuatif dengan Nilai SAKIP Bapenda yang belum optimal di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023, sementara 3 indikator lainnya yang mengalami peningkatan. Akan tetapi, apabila dilihat dari realisasi anggaran program dan kegiatan pendukung baik di tahun 2023 dan tahun 2024 sama-sama tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Begitu pula dengan persentase realisasi anggaran tahun 2025 Triwulan I yang baru mencapai 23,15% dari target yang telah ditetapkan. Terdapat perbedaan signifikan antara target dan realisasi anggaran, mengindikasikan perlunya perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program maupun kegiatan yang mendukung.

Hasil Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 s/d Tahun 2025 Triwulan I dapat dilihat di **Tabel II.5 s/d II.7** :

Tabel II.5
Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Indikator Kinerja	Program/Kegiatan Pendukung	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Nilai SAKIP Bapenda	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	60.300.600.963,00	56.672.343.908,00	93,98%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	684.222.220,00	677.751.223,00	99,05%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.941.006.624	41.748.006.737	92,90%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	582.000.000	563.547.300	96,83%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.428.693.119	5.372.289.847	98,96%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.542.829.000	6.233.826.059	95,28%
Persentase Aset dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.121.850.000	2.076.922.742	97,88%
-Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah - Nilai IKM	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	15.394.072.396,00	14.650.761.262,00	95,17%
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	15.394.072.396	14.650.761.262	95,17%
JUMLAH		75.694.673.359,00	71.323.105.170,00	94,22%

Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023, dapat diketahui bahwa pagu untuk tahun 2023 sampai dengan akhir parsial nilainya sebesar **Rp.75.694.673.359,00** yang terdiri dari 2 program dengan capaian realisasi anggaran sebesar **Rp.71.323.105.170,00** atau persentase realisasi sebesar **94,22%**.

Tabel II.6
Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Indikator Kinerja	Program/Kegiatan Pendukung	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Nilai SAKIP Bapenda	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	65.438.737.143,00	61.244.933.833,00	93,59%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.348.991.800.00	1.312.121.262,00	97.27%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46.204.670.485.00	43.095.603.412,00	93.27%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	559.748.000.00	521.158.600.00	93.11%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.626.617.125.00	3.401.505.340.00	93.79%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.960.599.775.00	7.547.581.054,00	94.81%
Persentase Aset dalam Kondisi Baik	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	155.228.000.00	147.169.500,00	94.81%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.821.427.275.00	1.803.382.655,00	99.01%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.668.820.000.00	2.640.636.506,00	98.94%
-Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli DaerahAset dalam Kondisi Baik - Nilai IKM	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	26.454.381.460.00	25.429.411.303,00	96.13%
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	26.454.381.460.00	25.429.411.303,00	96.13%
JUMLAH		91.893.118.603,00	86.674.345.136,00	94.32%

Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024, dapat diketahui bahwa pagu untuk tahun 2024 sampai dengan akhir parsial nilainya sebesar **Rp. 91.893.118.603,00** yang terdiri dari 2 program dengan capaian realisasi anggaran sebesar **Rp.86.674.345.136,00** atau persentase realisasi sebesar **94,32%**.

Tabel II.7
Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Triwulan I)

Indikator Kinerja	Program/Kegiatan Pendukung	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Nilai SAKIP Bapenda	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	80.796.508.788,00	13.018.257.352,00	16,11%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.146.633.812,00	39.139.200,00	3.41%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	61.537.258.647,00	8.815.287.516,00	14.33%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	729.998.800,00	0	0%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.714.550.000,00	1.466.307.690,00	54,02%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.176.550.845,00	1.072.250.748,00	13,12%
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.092.634.683,00	143.779.494,00	13,16%
Persentase Aset dalam Kondisi Baik	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	140.525.000,00	0	0%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.467.321.376,00	713.290.400,00	48.61%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.101.969.900,00	768.202.304,00	24.76%
-Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli DaerahAset	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	28.122.980.973,00	12.200.665.044,00	43,38%

Indikator Kinerja	Program/Kegiatan Pendukung	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
dalam Kondisi Baik - Nilai IKM				
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	28.122.980.973,00	12.200.665.044,00	43,38%
JUMLAH		108.919.489.761,00	25.218.922.396,00	23.15%

Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Triwulan I Tahun 2025, dapat diketahui bahwa pagu untuk Triwulan I tahun 2025 sampai dengan akhir parsial nilainya sebesar **Rp.108.919.489.761,00** yang terdiri dari 2 program dengan capaian realisasi anggaran sebesar **Rp.25.218.922.396,00** atau persentase realisasi sebesar **23,15%**.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat

Tujuan dan sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Bandung didasari oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 menjadi fondasi yang dibentuk demi mewujudkan visi presiden terpilih, yaitu "**Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**". Dalam rangka mencapai target dari agenda pembangunan nasional tersebut, ditetapkan 8 (delapan) skala prioritas nasional yang dikenal dengan **Asta Cita**, antara lain:

1. Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional;
3. Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan;
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesenjangan Gender;
5. Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Nilai Tambah Ekonomi;
6. Pembangunan dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi;
7. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi dan Narkoba;
8. Harmoni Lingkungan, Budaya, dan Toleransi Beragama; dan
9. Implementasi Asta Cita dalam Berbagai Sektor.

Adapun fokus utama dari RPJMN Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- **Penurunan Kemiskinan:** Mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.
- **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:** Fokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pelatihan.
- **Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan:** Mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, termasuk melalui penguatan UMKM dan pemerataan ekonomi.
- **Infrastruktur:** Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan, serta pembangunan kota-kota inovatif.
- **Reformasi Birokrasi:** Reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik.
- **Pemberantasan Korupsi:** Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh.
- **Kesehatan:** Peningkatan kualitas layanan kesehatan, termasuk BPJS Kesehatan dan ketersediaan obat-obatan.
- **Pendidikan:** Penguatan sektor pendidikan, sains, teknologi, dan digitalisasi.
- **Lingkungan Hidup:** Pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

- **Ketahanan Pangan, Energi, dan Air:** Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di Kabupaten Bandung berfungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah, berfokus mengupayakan peningkatan pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, dengan tujuan mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini diperkuat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Bapenda, serta program lintas Perangkat Daerah yang terkait dengan pendapatan daerah. Terdapat poin-poin penting dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat dalam lingkup ekonomi, yaitu pencapaian target pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, pengembangan potensi pendapatan daerah, serta pengendalian dan evaluasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan penelaahan terhadap dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 terkait serta hasil identifikasi terhadap permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Bandung, maka dibutuhkan perumusan visi Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai pedoman arah kebijakan lima tahun mendatang. Visi ini dibuat untuk menentukan fokus dan arah gerak Pemerintah Kabupaten Bandung dalam bekerja menuntaskan isu-isu yang ada dan meminimalisasi potensi permasalahan di masa mendatang.

Selain itu, dalam rangka pencapaian sasaran Badan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah, ditetapkan kebijakan-kebijakan dan program-program yang dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 s/d 2029 berdasarkan pada misi ketiga RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kab. Bandung untuk menetapkan tujuan dan sasaran rencana kerja Badan Pendapatan Daerah. Adapun visi kepala daerah terpilih di Kab. Bandung, misi ketiga RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kab. Bandung serta tujuan, dan sasaran Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

Visi	Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera (BEDAS), Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas
Misi	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel
Tujuan	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah
Sasaran	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Table III.1

Tabel Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai SAKIP - Persentase Aset dalam Kondisi Baik			-85,60 Poin -88,00%
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kinerja perangkat daerah		100%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen
			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	44 Data
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah		100%

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/bulan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Prosentase Perwujudan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase Perwujudan Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah		100%
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen
			Pemulangan Pegawai yang Pensiun			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	1 Orang
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	180 Orang

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	180 Orang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen
			Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
			Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit
			Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit
			Prosentase Perwujudan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase Perwujudan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Perwujudan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	126 Unit
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	66 Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Prosentase Perwujudan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	- Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah - Nilai IKM			- 50,35% - 84 Poin
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		1. Tersusunnya Perencanaan target pajak daerah 2. Tercapainya penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak I 3. Tercapainya penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak II 4. Tertagihnya Piutang Pajak Daerah	Jumlah Target Pajak Daerah Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak I Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak II Jumlah penerimaan piutang pajak daerah	740.425.300.000,00 295.855.700.000,00 328.091.200.000,00 26.320.000.000,00
			Perencanaan pengelolaan pajak daerah			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Dokumen
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah I Soreang			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah II Dayeuhkolot			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah III Ciparay			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah IV Majalaya			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah V Rancaekek			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	9 Unit
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	8 Laporan
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2 Obyek Pajak
			Penetapan Wajib Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	14 Layanan
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	2 Dokumen
			Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan

3.3 Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan prioritas yang disusun dan diajukan untuk ditempuh dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 adalah program gabungan untuk mendukung program urusan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan urusan wajib yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada **Tabel III.2**. Selain itu, untuk tahun selanjutnya yaitu Tahun Anggaran 2026, telah dirumuskan perkiraan maju atas rencana masing masing Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dengan target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif yang bisa dilihat pada **Tabel T-C.33** sebagai berikut :

Table III.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

NO	SASARAN STRATEGIS PEMDA		SASARAN PERANGKAT DAERAH			NO	URAIAN			TARGET KINERJA	NILAI ANGGARAN
	URAIAN SASARAN STRATEGIS	SASTRA RELEVAN DAN MENGGAMBARKAN MANDAT	UNIT KERJA	URAIAN SASARAN OPD	SASARAN OPD RELEVAN DENGAN SASTRA PEMDA DAN MENGGAMBARKAN TUGAS DAN FUNGSI		NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Y	Badan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Y	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan	- Nilai SAKIP - Persentase Aset dalam Kondisi Baik	-85,60 Poin -88,00%	72.990.839.888,00
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kinerja perangkat daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kinerja perangkat daerah	100%	1.096.633.812,00
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Rencana Kerja)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	777.361.397,00
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.990.000,00
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.720.000,00
							Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Tersusunnya Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.840.000,00
							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.140.000,00
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Ikhtisar Realisasi Kinerja-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	228.146.790,00
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	15.760.000,00

NO	SASARAN STRATEGIS PEMDA		SASARAN PERANGKAT DAERAH			NO	URAIAN			TARGET KINERJA	NILAI ANGGARAN
	URAIAN SASARAN STRATEGIS	SASTRA RELEVAN DAN MENGGAMBARAKAN MANDAT	UNIT KERJA	URAIAN SASARAN OPD	SASARAN OPD RELEVAN DENGAN SASTRA PEMDA DAN MENGGAMBARAKAN TUGAS DAN FUNGSI		NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tersusunnya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	27.962.500,00
							Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Tersusunnya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	44 Data	18.713.125,00
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah	100%	54.328.870.787,00
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/bulan	54.203.988.287,00
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun-SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	18.926.000,00
							Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersusunnya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.500.000,00
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Bulanan Triwulanan Semesteran-SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	103.456.500,00
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	7.806.450,00
							Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.678.750,00
							Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.127.700,00

NO	SASARAN STRATEGIS PEMDA		SASARAN PERANGKAT DAERAH			NO	URAIAN			TARGET KINERJA	NILAI ANGGARAN
	URAIAN SASARAN STRATEGIS	SASTRA RELEVAN DAN MENGGAMBARAKAN MANDAT	UNIT KERJA	URAIAN SASARAN OPD	SASARAN OPD RELEVAN DENGAN SASTRA PEMDA DAN MENGGAMBARAKAN TUGAS DAN FUNGSI		NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100%	362.998.800,00
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	264.950.000,00
							Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	68.015.300,00
							Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	1 Orang	0,00
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	180 Orang	0,00
							Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	180 Orang	30.033.500,00
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	3.577.175.701,00
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	206.909.800,00
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	288.020.000,00
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya paket Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	736.804.500,00
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.430.245.900,50
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	405.029.950,50
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersusunnya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	57.000.000,00
							Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Paket Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	224.933.100,00

NO	SASARAN STRATEGIS PEMDA		SASARAN PERANGKAT DAERAH			NO	URAIAN			TARGET KINERJA	NILAI ANGGARAN
	URAIAN SASARAN STRATEGIS	SASTRA RELEVAN DAN MENGGAMBARAKAN MANDAT	UNIT KERJA	URAIAN SASARAN OPD	SASARAN OPD RELEVAN DENGAN SASTRA PEMDA DAN MENGGAMBARAKAN TUGAS DAN FUNGSI		NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.000.000,00
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	199.517.450,00
							Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.715.000,00
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.448.048.976,00
							Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	5.000,00
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	5.000,00
							Pengadaan Mebel	Tersedianya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	109.523.000,00
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.338.515.976,00
							Prosentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20%	8.411.830.819,00
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	28.000.000,00
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	669.999.974,00
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.713.830.845,00

NO	SASARAN STRATEGIS PEMDA		SASARAN PERANGKAT DAERAH			NO	URAIAN			TARGET KINERJA	NILAI ANGGARAN
	URAIAN SASARAN STRATEGIS	SASTRA RELEVAN DAN MENGGAMBARAKAN MANDAT	UNIT KERJA	URAIAN SASARAN OPD	SASARAN OPD RELEVAN DENGAN SASTRA PEMDA DAN MENGGAMBARAKAN TUGAS DAN FUNGSI		NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemenuhan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	2.664.839.860,00
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	26.000.000,00
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	126 Unit	153.900.000,00
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	66 Unit	437.670.000,00
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.184.997.460,00
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	862.272.400,00
							Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	1.092.634.683,00
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	1.092.634.683,00

NO	SASARAN STRATEGIS PEMDA		SASARAN PERANGKAT DAERAH			NO	URAIAN			TARGET KINERJA	NILAI ANGGARAN
	URAIAN SASARAN STRATEGIS	SASTRA RELEVAN DAN MENGGAMBARAKAN MANDAT	UNIT KERJA	URAIAN SASARAN OPD	SASARAN OPD RELEVAN DENGAN SASTRA PEMDA DAN MENGGAMBARAKAN TUGAS DAN FUNGSI		NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Potensi Pajak Daerah	- Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah - Nilai IKM	- 50,35% - 84,00 Poin	22.573.086.773,00
							KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tersusunnya Perencanaan target pajak daerah Tercapainya penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak I Tercapainya penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak II Tertagihnya Piutang Pajak Daerah	Jumlah Target Pajak Daerah Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak I Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak II Jumlah penerimaan piutang pajak daerah	740.425.300.000,00 295.855.700.000,00 328.091.200.000,00 26.320.000.000,00	22.573.086.773,00
							Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Tersusunnya Dokumen Pencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Dokumen	650.638.033,00
							Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Tersusunnya Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	451.472.413,00
							Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah I Soreang	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	690.321.945,00
							Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah II Dayeuhkolot	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	350.719.945,00
							Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah III Ciparay	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	312.700.945,00
							Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah IV Majalaya	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	282.697.945,00
							Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah V Rancaekek	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	282.697.945,00
							Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	9 Unit	139.896.780,00

NO	SASARAN STRATEGIS PEMDA		SASARAN PERANGKAT DAERAH			NO	URAIAN			TARGET KINERJA	NILAI ANGGARAN
	URAIAN SASARAN STRATEGIS	SASTRA RELEVAN DAN MENGGAMBARAKAN MANDAT	UNIT KERJA	URAIAN SASARAN OPD	SASARAN OPD RELEVAN DENGAN SASTRA PEMDA DAN MENGGAMBARAKAN TUGAS DAN FUNGSI		NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	8 Laporan	1.086.566.400,00
							Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	412.950.151,00
							Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terpenuhinya Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2 Obyek Pajak	15.298.654.750,00
							Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersusunnya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	672.648.001,00
							Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terpenuhinya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	14 Layanan	75.950.000,00
							Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Tersusunnya Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	2 Dokumen	143.550.000,00
							Penagihan Pajak Daerah	Tersusunnya Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	984.241.600,00
							Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Tersusunnya Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	222.701.870,00
							Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Tersusunnya Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	504.678.050,00
							Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	10.000.000,00

Tabel T-C 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Bandung

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Setelah Pemetaan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	2	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai SAKIP - Aset dalam Kondisi Baik	Kab. Bandung	- 85,60 poin - 88,00	72.990.839.888,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	- 85,70 poin - 89,00	80.289.923.876,80
5	2	1	2.01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kinerja perangkat daerah	Kab. Bandung	100%	1.096.633.812,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	100%	1.206.297.193,20
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung	4 Dokumen	777.361.397,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	4 Dokumen	855.097.536,70
5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bandung	1 Dokumen	6.990.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	1 Dokumen	7.689.000,00
5	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung	1 Dokumen	7.720.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	1 Dokumen	8.492.000,00
5	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bandung	1 Dokumen	6.840.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	1 Dokumen	7.524.000,00
5	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bandung	1 Dokumen	7.140.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	1 Dokumen	7.854.000,00
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung	12 Laporan	228.146.790,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	12 Laporan	250.961.469,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Setelah Pemetaan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung	1 Laporan	15.760.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	1 Laporan	17.336.000,00
5	2	1	2.01	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab.Bandung	1 Dokumen	27.962.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	1 Dokumen	30.758.750,00
5	2	1	2.01	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab.Bandung	44 Data	18.713.125,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	44 Data	20.584.437,50
5	2	1	2.02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah	Kab. Bandung	100%	54.328.870.787,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	100%	59.761.757.865,70
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung	104 Orang/bulan	54.203.988.287,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PAD	PD	96 Orang/bulan	59.624.387.115,70
5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bandung	1 Laporan	18.926.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	1 Laporan	20.818.600,00
5	2	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Bandung	1 Dokumen	2.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	1 Dokumen	2.750.000,00
5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bandung	18 Laporan	103.456.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	18 Laporan	113.802.150,00
5	2	1	2.03	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bandung	100%	7.806.450,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	100%	8.587.095,00
5	2	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bandung	1 Dokumen	5.678.750,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	1 Dokumen	6.246.625,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Setelah Pemetaan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	2	1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bandung	1 Laporan	2.127.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	1 Laporan	2.340.470,00
5	2	1	2.05	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Kab. Bandung	100%	362.998.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	100%	399.298.680,00
5	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bandung	2 Paket	264.950.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	2 Paket	291.445.000,00
5	2	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bandung	1 Dokumen	68.015.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	1 Dokumen	74.816.830,00
5	2	1	2.05	6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Kab. Bandung	1 Orang	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	1 Orang	0,00
5	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Bandung	180 Orang	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	180 Orang	0,00
5	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bandung	180 Orang	30.033.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	180 Orang	33.036.850,00
5	2	1	2.06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bandung	100%	3.577.175.701,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	100%	3.934.893.271,10
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	206.909.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	1 Paket	227.600.780,00
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	5 Paket	288.020.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	5 Paket	316.822.000,00
5	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Bandung	3 Paket	736.804.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	3 Paket	810.484.950,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Setelah Pemetaan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	1.430.245.900,50	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	1 Paket	1.573.270.490,55
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	405.029.950,50	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	1 Paket	445.532.945,55
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Bandung	4 Dokumen	57.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	4 Dokumen	62.700.000,00
5	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	224.933.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	1 Paket	247.426.410,00
5	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bandung	12 Laporan	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	12 Laporan	27.500.000,00
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandung	12 Laporan	199.517.450,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	12 Laporan	219.469.195,00
5	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bandung	1 Dokumen	3.715.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	1 Dokumen	4.086.500,00
5	2	1	2.07	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bandung	20%	1.448.048.976,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	100%	1.592.853.873,60
5	2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Unit	5.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	1 Unit	5.500,00
5	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Unit	5.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	1 Unit	5.500,00
5	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	109.523.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	1 Unit	120.475.300,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Setelah Pemetaan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Unit	1.338.515.976,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	1 Unit	1.472.367.573,60
5	2	1	2.08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bandung	100%	8.411.830.819,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	100%	9.253.013.900,90
5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bandung	12 Laporan	28.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	12 Laporan	30.800.000,00
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bandung	12 Laporan	669.999.974,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	12 Laporan	736.999.971,40
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	12 Laporan	7.713.830.845,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PAD	PD	12 Laporan	8.485.213.929,50
5	2	1	2.09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bandung	100%	2.664.839.860,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	100%	2.931.323.846,00
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bandung	1 Unit	26.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	1 Unit	28.600.000,00
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bandung	126 Unit	153.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	126 Unit	169.290.000,00
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bandung	66 Unit	437.670.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	66 Unit	481.437.000,00
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bandung	1 Unit	1.184.997.460,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	1 Unit	1.303.497.206,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Setelah Pemetaan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bandung	1 Unit	862.272.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	1 Unit	948.499.640,00
5	2	1	2.11	0	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bandung	100%	1.092.634.683,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	100%	1.201.898.151,30
5	2	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bandung	2 Orang	1.092.634.683,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	2 Orang	1.201.898.151,30
5	2	4	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	- Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah - Nilai IKM	Kab. Bandung	50,35% 84 Poin	22.573.086.773,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	-50,40% -84,5 Poin	24.830.395.450,30
5	2	4	2.01	0	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Target Pajak Daerah Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak I Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak II Jumlah penerimaan piutang pajak daerah	Kab. Bandung	740.425.300.000,00 295.855.700.000,00 328.091.200.000,00 26.320.000.000,00	22.573.086.773,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	777.446.600.000,00 304.731.400.000,00 337.933.900.000,00 25.760.000.000,00	24.830.395.450,30
5	2	4	2.01	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Bandung	4 Dokumen	650.638.033,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	4 Dokumen	715.701.836,30
5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Bandung	3 Dokumen	451.472.413,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	3 Dokumen	496.619.654,30
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah I Soreang	Kab. Bandung	12 Laporan	690.321.945,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	12 Laporan	759.354.139,50
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah II Dayeuhkolot	Kab. Bandung	12 Laporan	350.719.945,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	12 Laporan	385.791.939,50
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah III Ciparay	Kab. Bandung	12 Laporan	312.700.945,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	12 Laporan	343.971.039,50

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Setelah Pemetaan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah IV Majalaya	Kab. Bandung	12 Laporan	282.697.945,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	PD	12 Laporan	310.967.739,50
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah V Rancaekek	Kab. Bandung	12 Laporan	282.697.945,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	PD	12 Laporan	310.967.739,50
5	2	4	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Bandung	9 Unit	139.896.780,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	PD	9 Unit	153.886.458,00
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kab. Bandung	8 Laporan	1.086.566.400,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	PD	8 Laporan	1.195.223.040,00
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Bandung	1 Laporan	412.950.151,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	PD	1 Laporan	454.245.166,10
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Kab. Bandung	2 Obyek Pajak	15.298.654.750,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	PD	2 Obyek Pajak	16.828.520.225,00
5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Kab. Bandung	1 Dokumen	672.648.001,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	PD	1 Dokumen	739.912.801,10
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Bandung	14 Layanan	75.950.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	PD	14 Layanan	83.545.000,00
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kab. Bandung	2 Dokumen	143.550.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	PD	2 Dokumen	157.905.000,00
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kab. Bandung	1 Dokumen	984.241.600,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	PD	1 Dokumen	1.082.665.760,00
5	2	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Bandung	1 Dokumen	222.701.870,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	PD	1 Dokumen	244.972.057,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Setelah Pemetaan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Bandung	1 Dokumen	504.678.050,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	1 Dokumen	555.145.855,00
5	2	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Bandung	1 Laporan	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD	1 Laporan	11.000.000,00
					TOTAL				95.563.926.661,00				105.120.319.327,10

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah disusun setiap 1 (satu) tahun sekali dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan capaian kinerja sasaran RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Bandung. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan perangkat daerah yang menjadi prioritas daerah harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Perubahan Rencana kerja dan Pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat.

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah pada Tahun 2025 dapat dilihat pada **Tabel IV.1** berikut ini :

Tabel IV.1
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pada RKPD Perubahan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025

Badan Pendapatan Daerah

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	5	2	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai SAKIP - Aset dalam Kondisi Baik	Kab. Bandung	- 85,60 poin - 88,00%	72.990.839.888,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
2		5	2	1	2.01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kinerja perangkat daerah	Kab. Bandung	100%	1.096.633.812,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
3		5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung	4 Dokumen	777.361.397,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
4		5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bandung	1 Dokumen	6.990.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
5		5	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung	1 Dokumen	7.720.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
6		5	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bandung	1 Dokumen	6.840.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
7		5	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bandung	1 Dokumen	7.140.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
8		5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung	12 Laporan	228.146.790,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10
9		5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung	1 Laporan	15.760.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
10		5	2	1	2.01	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	1 Dokumen	27.962.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
11		5	2	1	2.01	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Bandung	44 Data	18.713.125,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
12		5	2	1	2.02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah	Kab. Bandung	100%	54.328.870.787,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
13		5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung	105 Orang/bulan	54.203.988.287,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PAD	PD
14		5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bandung	1 Laporan	18.926.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
15		5	2	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Bandung	1 Dokumen	2.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
16		5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bandung	18 Laporan	103.456.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
17		5	2	1	2.03	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bandung	100%	7.806.450,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10
18		5	2	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bandung	1 Dokumen	5.678.750,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
19		5	2	1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bandung	1 Laporan	2.127.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
20		5	2	1	2.05	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Kab. Bandung	100%	362.998.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
21		5	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bandung	2 Paket	264.950.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
22		5	2	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bandung	1 Dokumen	68.015.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
23		5	2	1	2.05	6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Kab. Bandung	1 Orang	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
24		5	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Bandung	180 Orang	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
25		5	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bandung	180 Orang	30.033.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
26		5	2	1	2.06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bandung	100%	3.577.175.701,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
27		5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	206.909.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10
28		5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	5 Paket	288.020.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
29		5	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Bandung	3 Paket	736.804.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
30		5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	1.430.245.900,50	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
31		5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	405.029.950,50	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
32		5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Bandung	4 Dokumen	57.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
33		5	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	224.933.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
34		5	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bandung	12 Laporan	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
35		5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandung	12 Laporan	199.517.450,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
36		5	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bandung	1 Dokumen	3.715.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
37		5	2	1	2.07	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bandung	20%	1.448.048.976,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10
38		5	2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Unit	5.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
39		5	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Unit	5.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
40		5	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Unit	109.523.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
41		5	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Unit	1.338.515.976,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
42		5	2	1	2.08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Perwujudan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bandung	100%	8.411.830.819,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
43		5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bandung	12 Laporan	28.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
44		5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bandung	12 Laporan	669.999.974,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
45		5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	12 Laporan	7.713.830.845,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PAD	PD
46		5	2	1	2.09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Perwujudan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bandung	100%	2.664.839.860,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10
47		5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bandung	1 Unit	26.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
48		5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bandung	126 Unit	153.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
49		5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bandung	66 Unit	437.670.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
50		5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bandung	1 Unit	1.184.997.460,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
51		5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bandung	1 Unit	862.272.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
52		5	2	1	2.11	0	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bandung	100%	1.092.634.683,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
53		5	2	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bandung	2 Orang	1.092.634.683,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10
54		5	2	4	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	- Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah - Nilai IKM	Kab. Bandung	-50,35% 84,00 poin	22.573.086.773,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	PD
55		5	2	4	2.01	0	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Target Pajak Daerah Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak I Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak II Jumlah penerimaan piutang pajak daerah	Kab. Bandung	740.425.300.000,00 295.855.700.000,00 328.091.200.000,00 26.320.000.000,00	22.573.086.773,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	PD
56		5	2	4	2.01	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Bandung	4 Dokumen	650.638.033,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	PD
57		5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Bandung	3 Dokumen	451.472.413,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	PD
58		5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah I Soreang	Kab. Bandung	12 Laporan	690.321.945,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	PD
59		5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah II Dayeuhkolot	Kab. Bandung	12 Laporan	350.719.945,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	PD
60		5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah III Ciparay	Kab. Bandung	12 Laporan	312.700.945,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	PD

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10
61		5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah IV Majalaya	Kab. Bandung	12 Laporan	282.697.945,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
62		5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah V Rancaekek	Kab. Bandung	12 Laporan	282.697.945,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
63		5	2	4	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Bandung	9 Unit	139.896.780,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
64		5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kab. Bandung	8 Laporan	1.086.566.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
65		5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Bandung	1 Laporan	412.950.151,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
66		5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Kab. Bandung	2 Obyek Pajak	15.298.654.750,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
67		5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Kab. Bandung	1 Dokumen	672.648.001,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
68		5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Bandung	14 Layanan	75.950.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
69		5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kab. Bandung	2 Dokumen	143.550.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10
70		5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kab. Bandung	1 Dokumen	984.241.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
71		5	2	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Bandung	1 Dokumen	222.701.870,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
72		5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Bandung	1 Dokumen	504.678.050,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
73		5	2	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Bandung	1 Laporan	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PD
TOTAL											95.563.926.661,00		

Perlu kami jelaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan yang ada, dan merupakan hasil analisis penyesuaian kebutuhan Badan Pendapatan Daerah pada tahun tersebut.

Sejalan dengan ketentuan yang dimaksud dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dari Anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 95.563.926.661,00** terdapat beberapa penyesuaian yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

Badan Pendapatan Daerah sebagai Badan yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan baik kepada masyarakat maupun Instansi terkait. Dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang berisi rencana dan target pelaksanaan program dan kegiatan dalam Tahun 2025 diarahkan kepada pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang disusun untuk dapat direalisasikan dan dicapai semaksimal mungkin sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dukungan dan komitmen dari seluruh aparatur pada Badan Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara konsekuen dan konsisten dengan dilandasi tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi harus terus ditingkatkan. Demikian pula perlu adanya dukungan dari pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan, sehingga Renja ini secara sinergi dapat mendukung pada pencapaian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Akhir kata kami berharap, Perubahan Rencana Kerja (Renja) pada Badan Pendapatan Daerah pada Tahun 2025 ini dapat dijadikan bahan dalam rangka pencapaian Visi Misi Badan Pendapatan Daerah.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

Ttd

AKHMAD DJOHARA

BUPATI BANDUNG

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA